

ANALISIS KORELASI TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DENGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA LEVEL PROVINSI DI INDONESIA

Jiilaan Ronaa Aanisah

jiilaan.ronaa@kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Rosita Noor Hayati

rosita.noor.hayati@kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Abstrak

Hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusannya sendiri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan tidak hanya keleluasaan tetapi juga beban tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Salah satu yang dapat menjadi faktor penentu dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran terbuka yang tinggi di mana hanya sebagian masyarakat memiliki pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis keterkaitan antara kemandirian daerah yang diukur melalui tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka suatu daerah melalui metode analisis regresi data panel. Analisis dilakukan pada data tingkat Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi di Indonesia tahun 2005 sampai dengan 2021. Hasil dari penelitian diperoleh adanya signifikansi ketiga variabel terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 62,14 persen. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah berdasarkan variabel yang diteliti belum secara menyeluruh memiliki pengaruh dalam penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai proyeksi awal atas kemampuan daerah dalam pengentasan pengangguran di daerah untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik atau referensi atas penelitian berkelanjutan.

Abstract

The rights, authority, and responsibilities granted to local governments to manage their own affairs, as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government, provide not only autonomy but also a unique burden for local governments in improving the welfare of their regions. One of the determining factors of public welfare is the high rate of open unemployment, where only a portion of the population has employment that can sustain their livelihood. This study analyzes the correlation between regional independence, measured through the level of Local Own-Source Revenue (PAD), and the Open Unemployment Rate in a region using panel data

regression analysis. The analysis was conducted on data from Indonesia's provincial PAD and Open Unemployment Rate from 2005 to 2021. The results show that the three variables significantly affect the Open Unemployment Rate in Indonesia by 62.14 percent. From these findings, it can be concluded that regional independence, as measured by the variables studied, has not comprehensively impacted the reduction of the Open Unemployment Rate in the regions. Therefore, further research is needed to obtain more accurate results. This study can serve as an initial projection of the region's ability to reduce unemployment and be used as a foundation for public policy considerations or as a reference for ongoing research.

Kata Kunci: *kemandirian daerah, PAD, pengangguran terbuka*